



Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia: Ceramah dan Diskusi di Majelis Ta'lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan

Ali Noer Zaman¹, Endang Sulastri², Hilaly Basya³, Usni⁴, Muhammad Kosasih⁵,
Putri Ade Fitriani⁶, Muhammad Eggy⁷, Marlina Sintyawati⁸

Program Studi Ilmu Politik^{1,2,4,5,6,7,8}, Program Studi Magister Studi Islam³

Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: alinoerzaman@umj.ac.id

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan masalah yang masih dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Meskipun perempuan telah terlibat dalam berbagai kegiatan dan penyelesaian masalah di tingkat masyarakat, namun jika dilihat dari pemilu 2019, jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan baru mencapai sekitar 20%, dan belum mencapai 30% sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Berbagai masalah yang merintangai kehadiran besar perempuan dalam politik adalah di antaranya sistem pemilu di Indonesia, sikap dan kemauan politik dari partai politik, dan budaya patriarki yang masih mendominasi. Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, perlu dilakukan pendidikan politik. Salah satunya adalah melalui ceramah dan diskusi yang diselenggarakan di tingkat akar rumput menyangkut peran penting perempuan dalam politik yang dilakukan di Majelis Ta'lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan. Pengabdian masyarakat ini berhasil memantik kesadaran masyarakat tentang perlunya perempuan berperan dalam politik sebagaimana terbukti dari keaktifan mereka memberi pertanyaan dan komentar atas pemaparan isu ini dalam diskusi.

Kata Kunci: *Partisipasi Perempuan, Demokrasi, Pemilu, Patriarki.*

Abstract

Women's participation in politics in Indonesia is a problem that is still being faced by the country and Indonesian community. Even though women have been involved in various problem solving-activities, when viewed from the 2019 election, the number of women's representative has only reached around 20%, and failed to fulfil 30% quota as stipulated in the law. Various problems hindered the sufficient presence of women in politics including the electoral system in Indonesia, the policies and political will of political parties, and the patriarchal culture that still dominates. To increase awareness of the importance of women's participation in politics, it is necessary to conduct political education. One way is through discussions held at the Nurkhozin Al-Jaelani Ta'lim Assembly, South Tangerang, Banten Province which succeeded in sparking public awareness about the need for women to play a role in politics as evidenced by their responses during the discussion of the issue.

Kata Kunci: *Women's Participation, Democracy, Elections, Patriarchy.*

PENDAHULUAN

Budaya patriarki di kalangan masyarakat Indonesia masih mengakar kuat dan mendominasi kehidupan (Nurchayyo, 2016; Nurmila, 2015). Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat melekat. Hal ini terjadi merata pada wilayah pedesaan maupun perkotaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah yang perlu dilindungi, dan terbelenggu dengan ketergantungan. Doktrin tersebut telah di terima secara turun-temurun. Budaya patriarkial yang menilai perempuan hanya berperan dalam kehidupan domestik telah tumbuh menjadi mitos yang akhirnya menghambat pemberdayaan perempuan. Apalagi budaya patriarki tersebut terkadang mendapatkan justifikasi dari nilai-nilai budaya dan pemahaman agama sepihak (Putriana & Ariani, 2023).

Pemberdayaan dan penguatan peran perempuan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Caranya adalah dengan memberi akses yang luas dalam bidang pendidikan, kegiatan sosial, dan partisipasi politik. Indonesia memang telah memberi kuota 30% bagi keterlibatan perempuan di parlemen sesuai dengan undang-undang no 12 Tahun 2003. Hanya saja pelaksanaan undang-undang tersebut perlu mendapatkan perhatian (Kertati, 2014).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.

Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik (kemenkopmk, 2021).

Dr. Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM menekankan pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran politik bagi perempuan. Pendidikan tersebut bisa dilakukan terhadap para remaja sejak usia 17 tahun.

Pendidikan politik dapat dilaksanakan mulai dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu yaitu umur 17 tahun yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi sehingga saat Pemilu nanti diadakan, mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat (Kemenkopkm, 2021).

Di kota Tangerang Selatan, anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mencapai lebih dari 30% berdasarkan hasil pemilu 2019 (IDN Times Banten, 2019). Namun, masih dirasa perlu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kehadiran wakil perempuan dalam Lembaga legislative untuk memberikan masukan berdasarkan perspektif mereka. Hal tersebut disebabkan masih banyak partai politik yang tidak menempatkan caleg perempuan pada nomor urut bawah yang tidak langsung bisa dilihat pertama kali di surat suara. Bahkan timbul kesan bahwa partai politik hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban dalam syarat pencalonan anggota legislative yang harus menampung kuota 30% perwakilan Perempuan (Lestari, 2019)

METODE

Metode: Pendidikan Masyarakat. untuk meningkatkan kesadaran politik di masyarakat, pengabdian masyarakat, perlu dilakukan Pendidikan masyarakat, yang dalam hal ini melalui ceramah dan diskusi penulis dengan jamaah Majelis Ta'lim Nurkhozin Al-Jaelani, Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik sebenarnya punya fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Dengan kata lain, partai politik memiliki peran strategis dalam mengubah wajah parlemen di Indonesia. Partai politik merupakan penentu komposisi anggota parlemen (Pasaribu, 2017).

Di sisi lain, masyarakat sipil dan insan kampus memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi politik kepada warga. Di tengah budaya masyarakat yang masih didominasi oleh budaya lisan, masyarakat sipil dan akademisi perlu terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberi pencerahan dan berbicara langsung mengenai persoalan-persoalan yang menghambat keterlibatan perempuan dalam berkarya di ruang publik (Chudzaifah & Pramudiani, 2021).

Kampus merupakan bagian dari masyarakat berpendidikan dan masyarakat sipil. Ia mewakili kewajiban moral untuk mencerdaskan warga negara, sehingga semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pembangunan. Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta secara geografis terletak di Kota Tangerang Selatan, sehingga ia secara moral memiliki kewajiban untuk membantu mencerdaskan warga sekitar termasuk dalam bidang politik.

Dalam kerangka untuk menjalankan pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan dalam bidang politik, maka dilakukan pengabdian masyarakat dengan judul Pendidikan Politik Perempuan di Majelis Ta'lim Nurkhozin Al-Jaelani. Metodenya adalah Ceramah dan Diskusi dengan mengambil tema "Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia", yang bertempat di rumah H.Muhammad Nurul Irfan Jl. Puspipitek, Gg Melon Rt 02/04 no 79, Buaran Serpong, Tangsel, yang dihadiri oleh para jamaah yang terdiri atas bapak dan ibu, serta beberapa anak muda. Kegiatan dilaksanakan pada

hari Sabtu, Pukul 05.30, WIB, setelah kegiatan rutin yang dijalankan setiap hari sabtu, yakni kajian kitab kuning. Tuan rumah kegiatan tersebut adalah Dr. H. Muhammad Irfan, M.Ag, yang sekaligus bertindak sebagai ketua jamaah.

Dalam pemaparan materi, diupayakan menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari ungkapan yang rumit. Pertama-tama, tim pengabdian masyarakat menjelaskan terlebih dahulu makna politik. Tim menekankan bahwa politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mungkin memandang bahwa politik adalah berkenaan dengan pengejaran kekuasaan untuk menjadi kepala desa, bupati, anggota parlemen dan berbagai posisi di pemerintahan yang dijalankan secara kotor. Namun demikian, ditekankan bahwa meski politik itu dianggap kotor, ia adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh setiap orang, tanpa mengenal jenis kelamin. Dalam hal ini, politik dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan. Dicontohkan bahwa dalam keluarga juga terdapat politik. Dalam relasi antara suami dan istri, antara orangtua dan anak, antara anak pertama dan kedua, senantiasa terdapat relasi kuasa. Seorang suami mungkin saja memiliki jabatan yang tinggi di tempat kerjanya, apakah di instansi pemerintah ataukah perusahaan swasta, namun ketika sang suami sampai di rumah, bisa saja pengaruh suami kalah dengan pengaruh istri. Hal ini dimungkinkan karena istri yang mengatur segala kebutuhan rumah tangga, sehingga ia memegang keuangan. Selain itu, karena istri banyak berada di rumah, ia memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak. Dalam pembuatan keputusan, maka tidak mengherankan jika istri memiliki peran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan sang suami.

Dalam kasus lain, relasi kuasa bisa ditentukan oleh kekayaan atau posisi sosial seseorang (Hannan & Abdillah, 2019). Orang yang memiliki kekayaan cenderung akan dihormati, sehingga jika ia terlibat dalam pembuatan keputusan, besar kemungkinan suaranya akan lebih didengar. Posisi seseorang sebagai ketua RT, RW, atau memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan memungkinkannya untuk memiliki pengaruh yang besar di masyarakat dibandingkan orang biasa-biasa saja yang tak memiliki kekayaan ataupun posisi sosial.

Tim pengmas juga menyampaikan bahwa politik juga dikenal dalam literatur Arab, yang diterjemahkan sebagai *assiyasah*, yang memiliki arti harfiah mengatur, mendidik, atau melatih (Zawawi, 2015).

Politik selain untuk membuat keputusan bisa juga dimaknai sebagai pengejaran kekuasaan. Pengejaran kekuasaan tersebut bisa dilakukan secara damai melalui musyawarah dan voting, tetapi terkadang bisa juga dilakukan oleh beberapa orang melalui kekerasan senjata.

Tim pengmas menyampaikan bahwa partisipasi perempuan sangat penting agar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang masyarakat maupun pemerintah secara lebih berkeadilan. Partisipasi perempuan bisa dilakukan

melalui keterlibatan memiliki di Tempat Pemungutan Suara, kampanye pemilu, keterlibatan aktif di partai politik ataupun organisasi masyarakat, ikut dalam protes sosial, ataupun demonstrasi, dan ikut dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pembuatan perundang-undangan/peraturan. Mengingat sebagian besar jamaah yang ikut dalam majelis tersebut adalah bapak-bapak dan ibu-ibu rumah tangga, maka partisipasi yang paling memungkinkan bagi mereka adalah kepedulian kaum perempuan untuk terlibat dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga maupun masyarakat di lingkungan mereka.

Keterlibatan perempuan dalam politik sangat dinantikan (Wahyudi, 2018). mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta terdiri atas lelaki dan perempuan dengan presentasi yang kurang lebih sama, yakni 51% berbanding 49%. Dorongan keterlibatan perempuan juga sangat penting mengingat di Indonesia jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI baru mencapai sekitar 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU, 2019). Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan negara-negara lain seperti Filipina yang telah mencapai 30% atau negara-negara Barat seperti Selandia Baru, Spanyol, dan Swedia yang telah mencapai 40% atau lebih (IPU Parline, 2023).

Partisipasi perempuan dalam politik juga penting karena ia menandakan kemajuan demokrasi sebuah negara. Kualitas demokrasi sedikit banyak ditentukan oleh seberapa besar jumlah warga yang terlibat. Dengan jumlah perempuan di Indonesia yang merupakan separuh dari keseluruhan jumlah penduduk, maka perbaikan kualitas demokrasi menuntut partisipasi mutlak dari kaum perempuan. Apalagi, untuk mendorong partisipasi tersebut, telah muncul Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi (DPRD TK I), dan DPRD Kabupaten/Kota (DPRD TK II) untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Masih rendahnya partisipasi perempuan di Indonesia dalam politik disebabkan berbagai faktor. Pertama, sistem pemilu. Indonesia saat ini menganut system pemilu proporsional terbuka. Dalam system tersebut pemilih akan mencoblos/mencontreng nama partai politik dan nama calon anggota parlemen yang terpapar di kertas suara. Partai politik memiliki peran penting untuk menempatkan urutan nomor calon anggota parlemen. Meskipun nomor urut tidak lagi menjadi penentu keberhasilan calon anggota parlemen menjadi anggota tetap jika suara partai memenuhi syarat untuk masuk ke parlemen, namun nomor urutan atas memiliki kemungkinan paling banyak untuk dilihat oleh para warga pemilih.

Kedua, dibutuhkan kemauan politik yang besar dari partai politik untuk merekrut kaum perempuan yang memang betul-betul memiliki potensi besar terpilih sebagai anggota parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan bukan

sekedar untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Memang harus diakui bahwa perempuan masih sedikit yang terlibat dalam kegiatan dan kepengurusan organisasi sosial, kepemudaan, dan organisasi keagamaan. Padahal organisasi-organisasi tersebut memiliki peran penting sebagai tempat pelatihan dan penggemblengan kader-kader para pemimpin bangsa.

Ketiga, faktor budaya memiliki peran besar untuk mendorong atau mengecilkan hati kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik. Masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan memiliki tugas utama untuk hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Tugas bekerja dan berkegiatan di luar adalah wilayah laki-laki. Oleh karena itu, banyak perempuan yang mencukupkan diri dengan pendidikan yang rendah dan membatasi pergaulan sosial. Apalagi keadaan tersebut dikuatkan dengan nilai-nilai patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.

Faktor agama juga layak untuk dipertimbangkan sebagai penyebab kemajuan atau kemunduran keterlibatan perempuan. Beberapa teks agama secara harfiah bisa dimaknai bahwa tugas perempuan adalah membantu laki-laki untuk memimpin dan memajukan bangsa. Muncul ungkapan bahwa jika laki-laki masuk surga atau bahkan ke nereka, perempuan mau tidak mau juga akan ikut ke nereka. Sebuah hadis menyatakan bahwa umat atau bangsa yang dipimpin oleh perempuan akan celaka. Sudah banyak kajian yang mencoba untuk membantah pemahaman tersebut. Namun demikian, pemahaman agama adalah pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemahaman agama tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah pemahaman agama berdasarkan realitas sosial kontemporer. Keadaan sekarang di Indonesia adalah sebuah masyarakat yang sepakat untuk menerima nilai-nilai demokrasi untuk mengatur kehidupan sosial dan politik yang menuntut partisipasi warga apapun jenis kelaminnya. Pemahaman agama mestinya didorong untuk mendukung nilai-nilai demokrasi tersebut (Nur, 2019).

Pemaparan tim pengmas mendapat perhatian dan tanggapan dari peserta. Berikut ini disampaikan beberapa pertanyaan dari peserta. Penanya Pertama (Laki-Laki) menanyakan tentang makna surat *al-rijâlu qawwâmûna 'ala al-Nisâ*, yang artinya kurang lebih "Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan" (Al-Nisa' : 34), yang sering dijadikan alasan bagi banyak orang untuk melegitimasi dominasi kaum laki-laki atas perempuan dalam bidang politik. Pertanyaan kedua adalah faktor budaya yang menempatkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan, dalam istilah jawa, *swargo nunut, neraka katut*.

Penanya Kedua (Laki-Laki). Politik di Indonesia sudah cukup presiden di mana dalam setiap pemilu, semua warga apakah laki-laki atau perempuan diperbolehkan untuk ikut dalam pemilihan baik sebagai pemilih maupun calon anggota parlemen atau calon kepala daerah. Masalahnya, masyarakat Indonesia masih belum percaya untuk memilih anggota atau kepala daerah yang berjenis

kelamin perempuan. Apalagi, beberapa anggota parlemen atau kepala daerah berjenis kelamin perempuan terlibat dalam praktik korupsi.

Penanya ketiga (Perempuan), sejauhmana batasan perempuan menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Bagaimana memaksimalkan peran perempuan dalam tugas-tugas sebagai anggota parlemen atau kepala daerah.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, tim pengmas menjawab bahwa teks-teks agama memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan dari berbagai sisi. Sebagai misal adalah surat Al-Nisa ayat 34 di atas. Dalam berbagai tafsir, kita bisa temukan para ulama yang menafsirkan kata qawwana dengan arti pemimpin, tetapi ulama lain memandang bahwa qawwana bisa dipahami sebagai teman atau partner. Pemahaman tersebut dilatarbelakangi oleh ideologi, lingkungan dan Pendidikan dari para ulama yang menafsirkannya. Oleh karena itu, pemahaman agama sebaiknya perlu mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan politik di Indonesia saat ini yang telah menerima demokrasi sebagai aturan main untuk membuat keputusan dan memilih para pemimpin, di mana demokrasi tidak didasarkan pada keadaan jenis kelamin, suku, atau agama, dan masing-masing warga memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam persoalan korupsi, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah jenis kelamin dari anggota parlemen atau kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Politik di Indonesia saat ini didasarkan pada oligarki (Koho, 2021) yaitu, kemenangan dalam pemilu sangat ditentukan oleh mereka yang memiliki modal keuangan dan relasi kekuasaan. Para pemodal tersebut biasanya merupakan pengusaha, yang siap membiayai kampanye seorang calon, namun akan meminta ganti rugi jika calon yang didukungnya telah berhasil menjadi pejabat. Dengan demikian, seorang kepala daerah atau anggota parlemen tidak memiliki kontrak untuk semata-mata memajukan kepentingan rakyat. Ia terikat oleh kontrak dengan mereka yang memberikan biaya kampanye. Apalagi di Indonesia, sistem pemilihan umum yang dianut menuntut biaya sangat besar. Proses pemilihan yang kompleks menuntut tidak hanya popularitas tetapi juga upaya-upaya untuk dekat dengan warga, yang di antaranya melalui pembelian suara (money politics). Selain masalah modal, persoalan lain dalam pemilu di Indonesia adalah politik dinasti, yaitu seseorang akan terpilih dan memenangkan pemilu jika ia memiliki relasi yang kuat dengan penguasa sebelumnya. Kehadiran politik dinasti telah memungkinkan dominasi kelompok tertentu dalam menentukan arah pembangunan dan alokasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Terakhir, tim pengabdian masyarakat menyatakan bahwa untuk memaksimalkan peran perempuan dalam politik diperlukan kesadaran politik dari perempuan itu sendiri. Perempuan harus meningkatkan pengetahuan politik melalui Pendidikan yang tinggi. Ia tidak boleh berpuas diri dengan pengetahuan yang didapat dari rumah atau lingkungan sekitar. Perempuan harus bisa mencapai jabatan-jabatan strategis yang menentukan arah perjalanan parlemen dan jalan pemerintahan, sehingga kehadirannya tidak sekedar sebagai pelengkap.



Gambar 1. Foto Dokumen Kegiatan Pengabdian Masyarakat

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi perempuan di Indonesia membutuhkan kesadaran dari partai politik dan para pejabat pemerintah untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada perempuan. Mereka tidak seharusnya memandang peran perempuan sebagai aksesoris untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, system politik di Indonesia perlu diperbaiki untuk mengakomodir kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan, yang kebanyakan tak memiliki akses pada modal dan relasi kekuasaan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesadaran, organisasi sosial-keagamaan perlu mengedepankan tafsir agama sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang telah dianut dalam system sosial dan perpolitikan di Indonesia, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi budaya patriarki. Pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan kesadaran para pengunjung terutama kaum perempuan tentang pentingnya Perempuan aktif dalam politik. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme peserta dalam diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat. *Sosial Budaya*, 16(1), 9-24.
- Chudzaifah, I., Hikmah, A. N., & Pramudiani, A. (2021). Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi dan Masyarakat dalam Membangun Peradaban. 1. *Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat*, 1(1), 79-91.
- IDN Times Banten, (2019), Hasil Pileg 2019, Jumlah Anggota DPRD Perempuan Tangsel Naik 32 Persen, diunduh tanggal 11 Agustus 2023 dari <https://banten.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-iqbal-15/hasil-pileg-2019-jumlah-anggota-dprd-perempuan-tangsel-naik-32-persen>
- IPU Parline. (2023). Monthly ranking of women in national parliaments, <https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2023>
- Kemenkopmk, (2019). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa, diunduh tanggal 11 Agustus 2023 dari, <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan->

